

---

## **PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN SILPA DALAM PENGARUHNYA KINERJA KEUANGAN**

**Dwi Ratnasari<sup>a</sup>, Dianita Meirini<sup>b</sup>**  
<sup>ab</sup> UIN SATU Tulngagung, Indonesia  
[\\*saridwi242@gmail.com](mailto:*saridwi242@gmail.com)

*Diterima: Maret 2022. Disetujui: April 2022. Dipublikasi: Mei 2022*

---

### **ABSTRACT**

*Financial performance appraisal is very important to assess organizational accountability to produce better public services with spend public money economically, effectively, and efficiently, especially during economic recession. This goals of study to empirically examine the effect of regional original income, intergovernmental revenue, capital expenditures, and the remaining excess of budget financing on the financial performance of local governments as proxied by the efficiency ratio. The method of this research is quantitative research. A Saturated sample is the sampling technique, all population becomes the sample and the data analysis technique used panel data regression test, classical assumption test, and hypothesis testing. The results of this study indicate that financial performance cannot be affected by local revenue but financial performance can be negatively affected by balancing funds and finance, and financial performance can be positively influenced by capital expenditures. There is a simultaneous influence of all variables on the variables used in this study*

**Keywords:** *Financial Performance, Regional Original Income, intergovernmental revenue, Capital Expenditures, And SILPA*

### **ABSTRAK**

Penilaian kinerja keuangan untuk mengevaluasi akuntabilitas sebuah organisasi sangat penting dalam memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dengan membelanjakan uang masyarakat secara ekonomis, efektif, dan efisien, terutama pada saat resesi ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan dan SILPA yang diprosikan melalui rasio keuangan yang berupa rasio efisiensi. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pendekatan pada penelitian ini. Sampel jenuh untuk teknik pengambilan sampel. Teknik analisis data pada penelitian ini berupa uji regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan Uji T, kinerja keuangan tidak dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah tetapi kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan silpa, serta kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara positif signifikan oleh belanja modal. Terdapat pengaruh secara simultan seluruh variabel bebar terhadap variabel terikat dalam penelitian ini.

---

---

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA

---

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah harus dipastikan oleh pihak eksekutif maupun legislatif dapat memberikan pertanggungjawaban atas segala informasi keuangan serta informasi penganggaran dan perencanaan (Rokhmah, 2021). Akuntabilitas organisasi dinilai dengan evaluasi kinerja keuangan atas laporan keuangan dalam menghasilkan sebuah pelayanan publik dimana pemerintah yang membelanjakan uang publik harus memiliki kemampuan belanja yang ekonomis, efektif dan efisien (Mardiasmo, 2009). Dalam upaya evaluasi kinerja, sebuah organisasi membuat indikator kinerja dan satuan ukur masing-masing kegiatan dengan menggunakan peran akuntansi manajemen sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi dapat diketahui sehingga mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

Fenomena pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini, realisasi pendapatan daerah Jawa Timur tahun 2018, 2019, dan 2020 selalu melebihi target meskipun berada pada kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, penerimaan PAD Pemprov Jawa Timur menurun 7% dari Rp 19.327.125.485.405,9 menjadi Rp 17.951.235.057.953,1 serta terjadi penurunan penerimaan PAD pada 16 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu, pencapaian realisasi belanja sebesar Rp 32,28 T atau 93,41% dari penetapan belanja tahun 2020 yaitu sebesar Rp 34,56 triliun. Pencapaian tahun 2020 lebih baik dibanding 3 tahun sebelumnya. Pada saat resesi ekonomi ini, pemerintah seharusnya mengoptimalkan kegiatan belanja daerah karena belanja harusnya menjadi penopang roda perekonomian daerah. Masalah lain yaitu belanja modal yang tidak sebanding dengan belanja lain yang mengakibatkan pengeluaran belanja modal kurang sehat. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menunjukkan SILPA sebesar 3,7 triliun ini terbilang cukup besar, SILPA tersebut dipertanyakan apakah terjadi pelampauan pendapatan atau penghematan pengeluaran. Hal ini juga terjadi pada pemerintah daerah Jawa timur, yaitu 10 Pemda dengan tingkat

SILPA yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya (Wijayanto, 2021).

Dalam perwujudan desentralisasi, Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dalam mengatur daerahnya sendiri dalam mendorong peningkatan APBD dengan menambah tingkat pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah dapat secara mandiri dalam pengelolaan keuangannya serta tidak mengharapkan adanya transfer dari pemerintah pusat yang akhirnya penyeenggaraan pemerintah dapat berjalan secara maksimal dengan biaya dari diri pemerintah daerah itu sendiri. Adanya pertumbuhan pendapatan daerahi wilayah itu sendiri akhirnya dapat mendorong adanya perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk menambah nilai investasi daerah. Adanya infrastruktur yang memadai serta investasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan angka PAD dan dapat mengucurkan dana perimbangan dari pusat dalam rangka menambah belanja modal daerah tersebut (Thalib, 2019). Selain itu efisiensi penggunaan anggaran yang akan menimbulkan surplus anggaran dapat dipergunakan untuk periode selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai anggaran awal dalam pengelolaan pemerintahan.

Sumber keuangan yang bersumber dari wilayah itu sendiri disebut pendapatan asli daerah (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009). Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali PAD sangat penting untuk memperbesar alokasi PAD terhadap APBD. Apabila PAD mengalami peningkatan maka ketergantungan suatu wilayah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin kecil yang dapat menurunkan nilai kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi (Mulyani & Wibowo, 2017) . Penelitian dari (Elmiza & Arza, 2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan ialah dana yang ditransfer pemerintah pusat dari APBN guna mendanai kebutuhan suatu daerah dalam menjalankan rumah tangganya. Apabila dana perimbangan yang dikucurkan kepada daerah semakin besar, maka kinerja keuangan menjadi semakin baik. Kinerja yang baik ini membuat nilai kinerja keuangan menurut ketika diukur

dengan rasio efisiensi (Mulyani & Wibowo, 2017). Dalam penelitian (Thalib, 2019), kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara negatif oleh dana perimbangan sehingga efisiensi penggunaan dana transfer dari pusat untuk menyusutkan kekurangan sumber finansial pemerintah daerah.

Pengeluaran biaya untuk memperoleh suatu aktiva tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode serta lebih dari batas minimum kaputalisasi aset tetap/lain yang telah ditetapkan pemerintah disebut belanja modal (Fajri, 2016). Semakin banyak belanja modal yang dilakukan mencerminkan adanya pembangunan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nilai belanja modal yang tinggi dapat menurunkan nilai kinerja keuangan (Mulyani & Wibowo, 2017). Kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif oleh belanja modal (Antari & Sedana, 2018).

Menurut (Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, 2010) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau disingkat SILPA merupakan selisih dari surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Angka SILPA dalam APBD/APBN harus menunjukkan angka nol yang berarti pembiayaan yang ada pada suatu daerah dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran agar anggaran dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga kinerja keuangan dapat meningkat (Djuniar, 2018). Penelitian (Djuniar, 2018) kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif oleh SILPA.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari (Thalib, 2019) yaitu menambah variabel SILPA, menggunakan sampel seluruh kabupaten dan kota di Wilayah

Jawa Timur serta memilih periode pengamatan terbaru, yaitu tahun 2016-2020 yang menguji bagaimana faktor finansial mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif dan bagaimana pengaruh secara simultan variabel bebas dalam penelitian ini terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Timur Periode 2016-2020. Diharapkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dalam memperoleh pendapatan dan melakukan belanja negara dapat meningkatkan pelayanan kepada publik untuk penyelenggaraan desentralisasi tanpa memerlukan bantuan kepada pemerintah pusat. Dari beberapa penelitian terdahulu dan kondisi Pemerintah Daerah Jawa Timur terkait masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada "Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan SILPA Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa Timur Periode 2016-2020)."

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berupa pemerintahan daerah kabupaten dan kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) di Provinsi Jawa Timur dengan tahun pengamatan 5 tahun, yaitu tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh sehingga diperoleh total sampel sebanyak 190. Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2016-2020 yang diperoleh dari laman [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan website resmi pemerintah daerah terkait.

**Tabel 1.** Definisi Operasional serta Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala data	Sumber
<b>Variabel Terikat (Y)</b>				
Kinerja keuangan	Gambaran pencapaian hasil kerja keuangan daerah yang diukur dengan Rasio Efisiensi	Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio	(Thalib, 2019)
<b>Variabel Bebas (X)</b>				
Pendapatan Asli	Total realisasi	PAD = pajak daerah +	Rasio	(Mulyani

Daerah (X1)	pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri	<i>retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah + lain – lain PAD yang sah</i>		& Wibowo, 2017)
Dana Perimbangan (X2)	Jumlah seluruh realisasi dari pemerintah pusat	Dana perimbangan = <i>DBH + DAU + DAK</i>	Rasio	(Mulyani & Wibowo, 2017)
Belanja Modal (X3)	Belanja langsung yang terdapat dalam anggaran pemerintah daerah yang menambah masa manfaat aset tetap	<i>BM = Belanja tanah + peralatan dan mesin + gedung dan bangunan + jalan, irigasi, dan jaringan + aset tetap lainnya + konstruksi dalam pengerjaan + aset lainnya</i>	Rasio	(Mulyani & Wibowo, 2017)
SILPA (X4)	Selisih surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto	<i>SILPA = Surplus/Defisit + Jumlah Pembiayaan Netto</i>	Rasio	(Elmiza & Arza, 2020)

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dibantu aplikasi Eviews 10. Analisis berupa uji regresi data panel dengan penentuan model, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji F, dan uji T. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. uji regresi data panel dengan penentuan model, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji F, dan uji T.

Model persamaan regresi data panel adalah  $Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$ . Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD)  $\alpha$  = konstanta atau intercept,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ ,  $\beta_4$  = koefisien regresi, X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD), X2 = Dana Perimbangan (DP), X3 = Belanja Modal (BM), X4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),  $\epsilon$  = error, variabel pengganggu i = periode waktu t = individu/entitas. Dalam teknik estimasi model data panel, terdapat tiga teknik atau model yaitu dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM) (Widarjono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Regresi Data Panel

Model analisis regresi data panel yang dipilih dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect Model* (FEM). Penentuan model FEM ini berdasarkan pengujian menggunakan uji *chow* dan dilanjutkan dengan uji *hausman*. Berikut

persamaan regresi data panel yang diperoleh:  $KKPD = 13,96758 - 0,032986PAD - 0,394588DP + 0,113576BM - 0,019523SILPA + \epsilon$

Dari persamaan tersebut, dapat dijelaskan berikut ini :

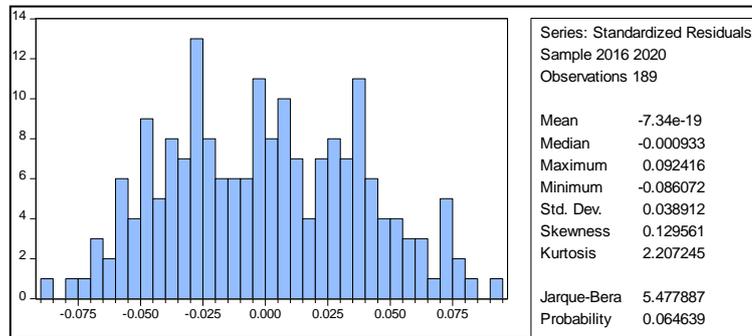
- Nilai konstanta sebesar 13,96758 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen yang meliputi PAD, DP, BM dan SILPA sebesar 0 atau tetap, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah akan tetap yaitu sebesar 13,96758.
- Koefisien regresi variabel X1 atau PAD sebesar -0,032986 menunjukkan setiap peningkatan PAD sebesar 1 satuan maka nilai KKPD akan menurun sebesar 0,032986.
- Koefisien regresi variabel X2 atau DP sebesar -0,394588 menunjukkan apabila terjadi peningkatan nilai KKPD akan mengalami penurunan 0,394588.
- Koefisien regresi variabel X3 atau BM sebesar 0,113576 menunjukkan apabila nilai belanja modal mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka nilai KKPD akan meningkat 0,113576.
- Koefisien regresi variabel X4 atau SILPA sebesar -0,019523 menunjukkan apabila terjadi peningkatan SILPA sebesar satu satuan, maka nilai KKPD akan menurun sebesar 0,019523

### 2. Uji Asumsi Klasik

**2.1. Uji Normalitas Data**

Pengujian ini menggunakan Uji Jarque-Bera (JB)  
Hasil signifikansi sebagai berikut.

**Tabel 2.** Tabel Uji Normalitas



Sumber : Data diolah penulis

Persyaratan uji normalitas jika nilai nilai *probability* > nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga data dapat dikategorikan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada tabel

diatas menunjukkan nilai jarque bera 5,477877 dan *probability* 0,64639 > 0,05 sehingga data telah terdistribusi normal.

**2.2. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3.** Uji Multikolinearitas

	PAD__X1	DP__X2	BM__X3	SILPA__X4
PAD__X1	1	0.60553829...	0.70624161...	0.52552839...
DP__X2	0.60553829...	1	0.76654937...	0.33394768...
BM__X3	0.70624161...	0.76654937...	1	0.28383038...
SILPA__X4	0.52552839...	0.33394768...	0.28383038...	1

Deteksi adanya multikolinearitas yaitu jika korelasi antara dua variabel independen melebihi 0,80. Berdasarkan matriks korelasi diatas, antara dua variabel

independen tidak terdapat korelasi yang tinggi diatas 0,80 sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas.

**2.3. Uji Heteroskedasitas**

**Tabel 4.** Uji Heteroskedasitas

Variable	Prob
C	0.4052
PAD__X1	0.5055
DP__X2	0.5863
BM__X3	0.5211
SILPA__X4	0.2211

Sumber : Data diolah penulis

Persyaratan uji heteroskedasitas apabila nilai *prob* < nilai signifikansi yaitu 0,05, maka data

terindikasi adanya heteroskedasitas, apabila nilai *prob* > 0,05, maka tidak terindikasi adanya heteroskedasitas.

Berdasarkan uji glejser diatas, semua variabel independen diatas 0.05, sehingga tidak

mengindikasikan adanya heteroskedasitas dalam model.

**2.4. Uji autokorelasi**

**Tabel 5.** Uji Durbin Watson

Durbin-Watson stat (DW)	1.821245
Durbin-Watson Upper (dU)	1,7189
Durbin-Watson Lower (dL)	1,8053
4 – dL	2,2811
4 – dU	2,1947

Sumber : Data diolah penulis

Jika nilai Durbin Watson terletak antaa batas atas (dU) dan (4 – dU) , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dari tabel diatas, nilai DW terletak antara dU

dan 4 – dU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

**3. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model FEM. Hasil uji regresi data panel adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.** Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.96758	1.826588	7.646811	0.0000
PAD__X1	-0.032986	0.029042	-1.135819	0.2579
DP__X2	-0.394588	0.065880	-5.989473	0.0000
BM__X3	0.113576	0.014362	7.908335	0.0000
SILPA__X4	-0.019523	0.009806	-1.990869	0.0483

Sumber : Data diolah penulis

**3.1. Uji T**

Uji signifikansi (Uji T) dilihat dari nilai probabilitas variabel independen. Apabila nilai prob < 0,05, maka variabel independen dapat dikatakan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel dependen. Hasil pengujian tabel 6, menunjukkan nilai prob. PAD 0,2579 > 0,05 dengan tanda koefisien negatif yang berarti H1 ditolak, artinya apabila Kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh PAD. Kemudian nilai prob. Dana perimbangan 0,0000 < 0,05 dengan tanda koefisien negatif yang berarti jika H<sub>2</sub> diterima, artinya kinerja keuangan dipengaruhi secara

negatif oleh dana perimbangan. Kemudian nilai prob. belanja modal 0,0000 < 0,05 dengan tanda koefisien positif yang berarti jika H<sub>3</sub> diterima, artinya kinerja keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh belanja modal. Sementara nilai prob. SILPA 0,0483 < 0,05 dengan tanda koefisien negatif sehingga H<sub>4</sub> diterima, artinya bahwa kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh SILPA.

**3.2. Uji F**

**Tabel 7.** Uji F

F-statistic	4.491447
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah penulis

Uji F atau uji signifikansi simultan dapat dilihat dari nilai F-statistik dan nilai probabilitas dengan keyakinan 5%. Dalam tabel 7, diperoleh nilai F-statistik sebesar 4,491447 serta nilai probabilitas sebesar 0,000000. Tingkat keyakinan sebesar 5% dengan total variabel sebanyak 5 dan total sampel sebanyak 189, diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,42. Berdasarkan nilai tersebut, maka  $F\text{-statistik} > F\text{-tabel}$  ( $4,491447 > 2,42$ ) dan nilai probabilitas  $F\text{-statistik} < 0,05$  ( $0,000000 < 0,05$ ) sehingga  $H_5$  diterima, artinya terdapat pengaruh secara simultan variabel bebas dengan variabel terikat.

### 3.3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

**Tabel 8.** Uji Adjusted R<sup>2</sup>

R-squared	0.556092
Adjusted R-squared	0.432280

Sumber : Data diolah penulis

Nilai R<sup>2</sup> dinilai dari rentang 1 sampai dengan 0, dimana nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 memiliki kemampuan besar dalam menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan pengujian tabel 6, nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,432280 atau 43,23%. Nilai ini dapat berarti bahwa variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen PAD, dana perimbangan, belanja modal dan SILPA pada tingkat 43,23%, sedangkan sisanya sebesar 56,77% dijelaskan oleh variabel dependen

lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Semakin tinggi alokasi PAD terhadap anggaran pemerintah daerah, maka keinginan daerah untuk mendapat bantuan pemerintah pusat semakin kecil. Hal ini berarti bahwa meningkatnya nilai PAD akan menurunkan nilai kinerja keuangan dalam pengukuran rasio efisiensi (Mulyani & Wibowo, 2017). Dengan adanya efisiensi penggunaan keuangan daerah, maka hal ini menunukkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya daerah melalui pajak dan retribusi sehingga output semakin tinggi. Sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik melalui pendapatan asli daerah dengan dipergunakan untuk melayani masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undnagn yang berlaku (Thalib, 2019).

Penelitian ini menghasilkan bahwa kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh PAD sehingga penelitian ini tidak mendukung teori dan penelitian terdahulu dari (Thalib, 2019) (Sari, 2019), dan (Prastiwi & Aji, 2020) yang menyatakan bahwa ada pengaruh negatif signifikan antara PAD terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian disebabkan karena tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di Jawa Timur masih tergolong rendah daripada total pendapatan daerah yaitu sebesar 21,05% sehingga pengelolaan PAD sebagai input dalam pencapaian target pemda di Jawa Timur dinilai kurang efektif dan efisien.

### Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tiap daerah mempunyai kemampuan menghimpun pendapatan yang berbeda sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alam, intensitas kegiatan ekonomi, serta adanya kewajiban untuk menjaga pencapaian standar pelayanan minimal sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dana transfer yang disebut dana perimbangan (Thalib, 2019). Dana

perimbangan yang besar akan meningkatkan kinerja keuangan sehingga kinerja keuangan dinilai semakin rendah ketika diukur dengan rasio efisiensi sehingga penggunaan dana transfer harus dilakukan secara bertanggungjawab dan berhati-hati untuk pelaksanaan program suatu pemerintah daerah karena dana ini akan dipantau dan diawasi oleh pemerintah pusat. (Mulyani & Wibowo, 2017).

Dalam penelitian ini, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga penelitian ini sejalan dengan teori sebelumnya dan penelitian Yasin (Yasin et al., 2017), Sari (Sari, 2019), dan (Prastiwi & Aji, 2020) dimana dana perimbangan yang diperoleh suatu daerah mengalami peningkatan, maka semakin efisien kinerja keuangan. Hal ini berarti pengelolaan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan juga pemerintah pusat sesuai dengan teori keagenan yang mana pemerintah daerah memberikan strategi terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan dana perimbangan dari pusat.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tujuan dalam melakukan belanja modal untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana bagi masyarakat. Adanya sarana dan prasarana yang layak dan dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga terjadi kesejahteraan (Thalib, 2019). Pemerintah daerah bertanggungjawab mengelola daerahnya sendiri dalam pengelolaan keuangan dengan strategi yang ekonomis, efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan dari pemerintah yang menciptakan kesejahteraan.

Dalam penelitian ini, variabel kinerja keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh belanja. Artinya, ketika pemerintah daerah melakukan belanja modal, maka pengelolaan keuangan pemerintah menjadi naik atau dinilai tidak baik, karena berdasarkan teori efisiensi dengan perolehan output yang dihasilkan dengan input yang serendah-rendahnya. Belanja modal merupakan sebuah investasi pemerintah

sehingga dapat dikatakan pembangunan pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Belanja modal meningkatkan aset tetap berupa infrastruktur yang dapat dikategorikan dalam instansi jangka panjang (Antari & Sedana, 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan belanja modal digunakan untuk mendapatkan sumber keuangan baru dalam beberapa tahun yang akan datang sehingga kesejahteraan masyarakat juga ditanggguhkan.

### **Pengaruh SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

SILPA merupakan selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto (UU RI No. 1 Tahun 2022, 2022). SILPA dapat digunakan sebagai salah satu faktor dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Narindra & Jati, 2016).

Dalam penelitian ini, SILPA mempengaruhi secara negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Djuniar, 2018). Penelitian ini dan penelitian terdahulu mendapat hasil yang sama terkait adanya SILPA yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Semakin sedikit angka SILPA dalam laporan keuangan menandai bahwa pembiayaan dilakukan dengan baik untuk membiayai kegiatan serta menutupi defisit yang terjadi sehingga tidak ada dana yang tidak dipergunakan.

### **Pengaruh Simultan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut (Antari & Sedana, 2018) PAD dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga belanja modal juga ikut meningkat. Menurut (Rantebalik et al., 2018) alokasi belanja daerah yang sesuai dengan perencanaan APBD dapat menekan defisit pada SILPA.

Pada penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi secara bersama sama oleh variabel independen PAD, Dana Perimbangan, belanja modal, serta SILPA. Variabel dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam artian tidak ada penelitian terdahulu yang menggunakan variabel yang sama persis dengan penelitian ini. Indikator evaluasi kinerja keuangan menurut (Mardiasmo, 2009) yaitu inputs dan outputs. Semakin besar inputs

dibanding outputs, maka tingkat efisiensi suatu organisasi semakin tinggi. Penelitian ini hanya menitik beratkan inputs yaitu PAD, dana perimbangan dan SILPA sedangkan pengeluaran outputs belanja modal. Dengan adanya pengelolaan input yang baik oleh pemerintah daerah untuk dibelanjakan secara efisien untuk pelayanan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan terbentuk dan masyarakat akan percaya terhadap pemerintah daerah tersebut.

## SIMPULAN

Hasil pengujian dari sampel yang ditentukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh dana perimbangan dan SILPA, serta kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh belanja modal. Kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur periode 2016-2020 juga dapat dipengaruhi secara simultan oleh PAD, dana perimbangan, belanja modal dan SILPA. Terdapat pengaruh secara simultan antara antar variabel bebas dan terikat sehingga apabila ada perubahan pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan SILPA, maka akan mempengaruhi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur periode 2016-2020.

Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memperluas cakupan penilaian kinerja keuangan yang lebih luas dengan rasio lainnya, seperti rasio kemandirian keuangan, rasio pertumbuhan ekonomi, rasio efektivitas, serta dengan menambah variabel lain, seperti belanja pembangunan, belanja rutin, *size*, *leverage*. Selain itu peneliti selanjutnya dapat melakukan pengamatan dengan menambah jumlah periode pengamatan sehingga memperoleh sampel yang lebih banyak dan penelitian menjadi lebih akurat.

## REFERENSI

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Bali Tahun 2011-2015). *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.
- Djuniar, L. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, (PAD), Belanja Modal, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*.
- Elmiza, & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2807–2825. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.250>
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi -Provinsi di Sumatera Utara. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 29–35.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.
- Narindra, A. A. N. M., & Jati, I. K. (2016). Indeks Pembangunan Manusia Memoderasi Pengaruh Kinerja Kapasitas Fiskal Daerah dan SILPA pada Daya Saing Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1364–1395.
- Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010* (pp. 1–413). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana

- Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Rantebalik, B., Tawakkal, T., & S, A. S. (2018). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 192–207. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4305>
- Rokhmah, A. N. (2021). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019* (Issue 1). Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Sari, I. P. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 679–692.
- Thalib, F. (2019). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur periode 2013-2017*. 1–18.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009* (Issue 57, p. 3).
- UU RI No. 1 Tahun 2022. (2022). *UU RI No. Tahun 2022* (Issue 104172).
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Wijayanto, J. (2021). *Dewan Pertanyakan Penyebab SILPA Sebesar Rp 3,7 Triliun*.
- Yasin, M., Riyadi, S., & Ingga, I. (2017). Analisis Pengaruh Struktur APBD terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 493–510.